# SATUAN KERJA (TW III)

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI SUMATERA UTARA UTARA

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

## Juli - September 2026



Jalan Suluh No. 99 A Kel. Sidorejo Hilir Medan

(061) 80033120

Prototype Rumah Susun Arunika 4 LT

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Triwulan III Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan sumber daya pada Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Triwulan III ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengendalian kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Dengan adanya evaluasi secara berkala, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya Laporan Evaluasi bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya **Laporan Triwulan III Tahun 2026** ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dimasa yang akan datang.

Medan, 01 Oktober 2026

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara

**Heri Sukarmanto, S.T., M.Eng**
NIP. 19821110 201012 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI .....
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
**1.1 Latar Belakang.** ..... 1
**1.2 Tugas dan Fungsi.** ..... 2
**1.3 Struktur Organisasi** ..... 4
**1.4 Sistematika Pelaporan.** ..... 5
BAB II ..... 6
CAPAIAN KINERJA ..... 6
**2.1. Target Kinerja Triwulan III.** ..... 6
**2.2. Capaian Target Triwulan III.** ..... 9
**2.3. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan.** ..... 12
BAB III ..... 16
PENUTUP ..... 16
**3.1. Rencana Tindak Lanjut.** ..... 16
**Tabel III.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.** ..... **16**
**3.2. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.** ..... 17

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari percapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Tugas dan Fungsi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang mempunyai tugas membantu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perdesaan, Direktorat Jenderal Perkotaan dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara turut mendukung penyelenggaraan Sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II, yaitu :

a) penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
b) penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
c) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
d) pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
f) pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
g) pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
h) pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
i) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
j) pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
l) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
m) pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

n) pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

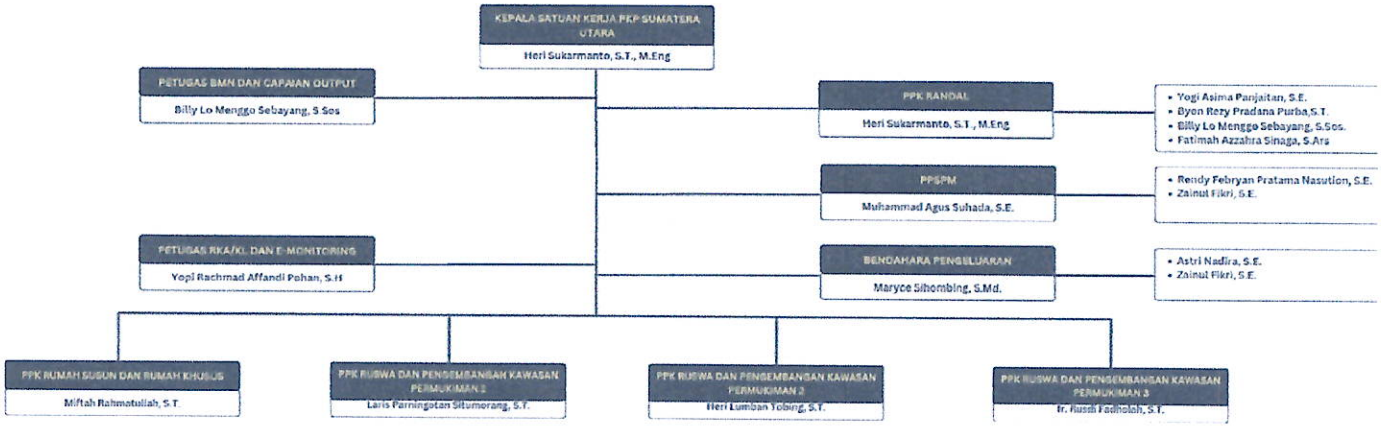
o) pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

## 1.3 Struktur Organisasi

Dasar hukum terbentuknya Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 194/KPTS/Sj/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

**Tabel I.3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.**




**BAB II CAPIAN KINERJA.**

Bab ini memuat capaian kinerja triwulanan dibandingkan dengan targetnya.

**BAB III PENUTUP.**

Bab ini memuat uraian upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun yang bersangkutan.

# BAB II
# CAPAIAN KINERJA

## 2.1. Target Kinerja Triwulan III.

Rencana Target Capaian Kinerja pada Triwulan III dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.1 Rencana Target Pencapaian Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (Juli – September) TA 2026 Sekretariat Jenderal**

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026**
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**PROVINSI SUMATERA UTARA**
**Sekretariat Jenderal**

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 1 | LAYANAN UMUM | 1 Laporan | S | 20.953.000 | 52,33 | 63,89 | 74,62 |
| 2 | OPERASIONAL,PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1 Laporan | S | 468.037.000 | 58,31 | 66,64 | 74,97 |
| 3 | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 1 Layanan | S | 206.400.000 | 66,64 | 74,97 | 83,33 |
| 4 | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | 1 Layanan | S | 96.000.000 | 69,89 | 79,58 | 86,98 |
| 5 | HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA | 1 Laporan | AU | 55.320.000 | 15 | 35 | 45 |
| 6 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Laporan | AU | 14.872.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 Laporan | AU | 18.360.000 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | | 879.942.000 | 56.46 | 65.43 | 73.52 |

**Tabel 2.1.2 Rencana Target Pencapaian Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (Juli – September) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.**

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026**
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**PROVINSI SUMATERA UTARA**
**Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 1 | Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman | 50 Unit | S | 50.000.000 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 2 | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh | 1 Laporan | S | 52.642.000 | 25 | 45,8 | 63 |
| 3 | Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | S | 99.219.000 | 22 | 31 | 47 |
| 4 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 2400 Unit | S | 71.180.000.000 | 22 | 31 | 51 |
| 5 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 Laporan | S | 6.582.329.000 | 21 | 31 | 46 |
| 6 | Pembangunan PSU Pada Perumahan Hunian di Provinsi Sumatera Utara | 50 Unit | S | 549.915.000 | 21 | 43 | 62 |
| 7 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara | 3 Paket | K | 7.418.094.000 | 12 | 34 | 53 |
| 8 | Biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II | 1 Laporan | AU | 183.890.000 | 15 | 32 | 51 |
| 9 | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara-biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II | 1 Laporan | AU | 1.005.586.000 | 12 | 35 | 61 |
| 10 | Perencanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara | 6 Paket | K | 3.709.047.000 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya Provinsi Sumatera Utara | 919 Unit | K | 247.269.816.000 | 0 | 12 | 32 |
| | TOTAL | | | 338.100.538.000 | 6.29 | 17.79 | 37.49 |

## Tabel 2.1.3 Rencana Target Pencapaian Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (Juli – September) TA 2026 Direktorat Jenderal Perdesaan

## RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
## SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
## Direktorat Jenderal Perdesaan

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 1 | Pemantauan dan Evaluasi | 1 Laporan | S | 37.058.000 | 32 | 45 | 62 |
| 2 | HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA | 1 Laporan | AU | 24.684.000 | 57,9 | 66,2 | 74,5 |
| 3 | Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana | 540 Unit | K | 19.686.600.000 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA | 1 Laporan | S | 110.796.000 | 0 | 0 | 10 |

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 5 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 5100 Unit | S | 102.000.000.000 | 10,2 | 35,96 | 48,96 |
| 6 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA | 5100 Unit | S | 8.368.740.000 | 10,56 | 35,96 | 52,39 |
| 7 | Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan | 1 Paket | K | 1.785.000.000 | 12 | 25 | 36 |
| 8 | Perencanaan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan | 1 Laporan | K | 118.917.000 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Supervisi Peinngkatan Kualitas Sanitasi Rumah | 1 Laporan | K | 114.000.000 | 0 | 12 | 36 |
| 10 | Pengawasan dan Pengendalian Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | AU | 48.355.000 | 6 | 12 | 36 |
| 11 | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan | 2 Laporan | K | 215.000.000 | 78 | 100 | 100 |
| 12 | Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan | 1 Paket | K | 8.440.000.000 | 0 | 10 | 38 |
| 13 | Manajemen konstruksi Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan (Kabupaten Samosir) | 1 Laporan | K | 392.000.000 | 0 | 12 | 38 |
| 14 | Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | AU | 331.812.000 | 0 | 10 | 38 |
| | TOTAL | | | 141.672.962.000 | 9,83 | 34,50 | 48,52 |

## Tabel 2.1.4 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (Juli – September) TA 2026 Direktorat Jenderal Perkotaan

### RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
### SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
### Direktorat Jenderal Perkotaan

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 1 | Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP | 1 Laporan | S | 24.320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan pemukiman sumatera utara | 1 Laporan | S | 14.800.000 | 31 | 42 | 55 |
| 3 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 2400 Unit | S | 53.500.000.000 | 18 | 31 | 55 |
| 4 | PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 Laporan | S | 4.304.367.000 | 12 | 28 | 47 |

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Rencana Fisik Per Bulan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jul | Ags | Sep |
| 5 | Perencanaan / REVIU DED Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan | 2 Laporan | K | 250.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun MBR KOTA MEDAN Provinsi Sumatera Utara | 1 Paket | K | 12.737.400.000 | 0 | 12 | 35 |
| 7 | MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR KOTA MEDAN | 1 Paket | K | 585.300.000 | 0 | 12 | 52 |
| 8 | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan | 1 Laporan | AU | 148.500.000 | 9 | 12 | 31 |
| | TOTAL | | | 71.564.687.000 | 15.67 | 28.66 | 52.30 |

## 2.2. Capaian Target Triwulan III.

Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sampai dengan akhir **September 2026** dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.2.1 Target Pencapaian Keuangan dan Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (September) TA 2026 Sekretariat Jenderal**

**CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026**
**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**PROVINSI SUMATERA UTARA**
**Sekretariat Jenderal**

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 1 | LAYANAN UMUM | 1 Laporan | S | 20.953.000 | 20.769.365 | 99,12 | 100 |
| 2 | OPERASIONAL,PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1 Laporan | S | 468.037.000 | 201.176.431 | 42,98 | 45,23 |
| 3 | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 1 Layanan | S | 206.400.000 | 46.133.842 | 22,35 | 24,36 |
| 4 | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | 1 Layanan | S | 96.000.000 | 20.770.897 | 21,64 | 22,69 |
| 5 | HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA | 1 Laporan | AU | 55.320.000 | 20.970.000 | 37,91 | 39,59 |
| 6 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 1 Laporan | AU | 14.872.000 | 14.700.000 | 98,84 | 100 |
| 7 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 1 Laporan | AU | 18.360.000 | 17.790.000 | 96,9 | 100 |
| | TOTAL | | | 879.942.000 | 342.310.535 | 38,9 | 40,89 |

## Tabel 2.2.2 Target Pencapaian Keuangan dan Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (September) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

### CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
### SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
### PROVINSI SUMATERA UTARA
### Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 1 | Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman | 50 Unit | S | 50.000.000 | 11.000.000 | 22 | 23,69 |
| 2 | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh | 1 Laporan | S | 52.642.000 | 44.072.712 | 83,72 | 85 |
| 3 | Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | S | 99.219.000 | 8.150.000 | 14,53 | 16,7 |
| 4 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 2400 Unit | S | 71.180.000.000 | 31.840.000.000 | 46,27 | 39,32 |
| 5 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 Laporan | S | 6.582.329.000 | 1.254.097.735 | 29,31 | 12,6 |
| 6 | Pembangunan PSU Pada Perumahan Hunian di Provinsi Sumatera Utara | 50 Unit | S | 549.915.000 | 77.597.484 | 14,11 | 15,22 |
| 7 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara | 3 Paket | K | 7.418.094.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II | 1 Laporan | AU | 183.890.000 | 71.105.541 | 38,67 | 39,89 |
| 9 | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara-biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II | 1 Laporan | AU | 1.005.586.000 | 439.967.035 | 43,75 | 43,89 |
| 10 | Perencanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara | 6 Paket | K | 3.709.047.000 | 591.205.000 | 15,94 | 100 |
| 11 | Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya Provinsi Sumatera Utara | 919 Unit | K | 247.269.816.000 | 13.998.287.920 | 5,66 | 0,25 |
| | TOTAL | | | 338.100.538.000 | 48.335.483.427 | 14,5 | 9,78 |

## Tabel 2.2.3 Target Pencapaian Keuangan dan Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (September) TA 2026 Direktorat Jenderal Perdesaan

### CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
### SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
### PROVINSI SUMATERA UTARA
### Direktorat Jenderal Perdesaan

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 1 | Pemantauan dan Evaluasi | 1 Laporan | S | 37.058.000 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 2 | HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA | 1 Laporan | AU | 24.684.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana | 540 Unit | K | 19.686.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA | 1 Laporan | S | 110.796.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 5100 Unit | S | 102.000.000.000 | 52.760.000.000 | 37,34 | 33,35 |
| 6 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA | 5100 Unit | S | 8.368.740.000 | 2.117.228.259 | 20,78 | 25,69 |
| 7 | Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan | 1 Paket | K | 1.785.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perencanaan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan | 1 Laporan | K | 118.917.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Supervisi Peinngkatan Kualitas Sanitasi Rumah | 1 Laporan | K | 114.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pengawasan dan Pengendalian Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | AU | 48.355.000 | 17.495.000 | 37,92 | 0 |
| 11 | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan | 2 Laporan | K | 215.000.000 | 99.534.588 | 46,3 | 100 |
| 12 | Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan | 1 Paket | K | 8.440.000.000 | 1.538.213.711 | 18,23 | 18,23 |
| 13 | Manajemen konstruksi Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan (Kabupaten Samosir) | 1 Laporan | K | 392.000.000 | 0 | 0 | 18,23 |
| 14 | Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | AU | 331.812.000 | 26.770.000 | 8,15 | 18,23 |
| | TOTAL | | | 141.672.962.000 | 56.559.241.558 | 34,7 | 31,67 |

**Tabel 2.2.4 Target Pencapaian Keuangan dan Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan III (September) TA 2026 Direktorat Jenderal Perkotaan**

## CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
## SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
## Direktorat Jenderal Perkotaan

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 1 | Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP | 1 Laporan | S | 24.320.000 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Nama Paket | Output | Jenis Pengadaan | Pagu Pengadaan (Rp. ) | Realisasi (Rp. ) | Progres (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Keu | Fisik |
| 2 | Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan pemukiman sumatera utara | 1 Laporan | S | 14.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 2400 Unit | S | 53.500.000.000 | 16.040.000.000 | 17,8 | 14,14 |
| 4 | PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA | 1 Laporan | S | 4.304.367.000 | 922.681.648 | 15,94 | 16,89 |
| 5 | Perencanaan / REVIU DED Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan | 2 Laporan | K | 250.000.000 | 197.805.552 | 79,12 | 100 |
| 6 | Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun MBR KOTA MEDAN Provinsi Sumatera Utara | 1 Paket | K | 12.737.400.000 | 5.087.632.920 | 39,94 | 0,52 |
| 7 | MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR KOTA MEDAN | 1 Paket | K | 585.300.000 | 0 | 0 | 0,52 |
| 8 | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan | 1 Laporan | AU | 148.500.000 | 66.966.305 | 45,1 | 45,69 |
| | TOTAL | | | 71.564.687.000 | 22.315.086.425 | 20,35 | 12,86 |

## 2.3. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan.

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Faktor Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Swadaya | Tahap Verifikasi :<br>- Data tidak lengkap<br>- Kelayakan tidak sesuai.<br>- Dokumen tidak valid | - Koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan calon penerima bantuan dalam melengkapi data..<br>- Dilakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi rumah dan calon penerima sesuai dengan data yang diajukan.<br>- Seluruh dokumen diverifikasi keaslian, kesesuaian, dan masa berlakunya dengan |

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Faktor Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| | | | instansi yang berwenang apabila diperlukan. |
| | | Tahap Penyusunan Laporan.<br>- Data yang digunakan untuk menyusun BAVerfal dan SK PPK tidak akurat atau tidak lengkap.<br>- Kriteria yang digunakan untuk menyusun BAVerfal dan SK PPK tidak sesuai dengan pedoman Bedah Rumah.<br>- Anggaran yang diusulkan tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan.<br>- Teknis pelaksanaan tidak jelas atau tidak sesuai dengan pedoman Bedah Rumah | - Dilaksanakannya survei dan validasi data secara menyeluruh sebelum penyusunan proposal.<br>- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan pihak terkait dalam penyediaan data.<br>- Penggunaan format dan instrumen pendataan sesuai pedoman Bedah Rumah.<br>- Seluruh penyusun proposal memahami dan mengacu pada pedoman teknis Bedah Rumah yang berlaku.<br>- Perhitungan volume pekerjaan dilakukan secara akurat sesuai hasil survei teknis.<br>- Melibatkan tenaga teknis yang kompeten dalam penyusunan anggaran.<br>- Dilakukan evaluasi kewajaran biaya sebelum proposal disampaikan.<br>- Metode pelaksanaan disusun secara rinci dan mengacu pada pedoman teknis Bedah Rumah.<br>- Spesifikasi teknis dan gambar rencana telah memenuhi standar yang ditetapkan. |

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Faktor Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| | | Tahap Pelaksanaan:<br>- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB).<br>- Pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai kaidah konstruksi program Bedah Rumah<br>- Proses pengadaan material melalui toko/penyedia mengalami keterlambatan<br>- Harga material fluktuatif sehingga memengaruhi kesesuaian anggaran<br>- Lokasi rumah sulit diakses kendaraan pengangkut material. | - Dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan secara cepat.<br>- Adanya komitmen dan partisipasi aktif seluruh anggota KPB dalam pelaksanaan Pembangunan.<br>- Toko/penyedia memiliki kapasitas pasokan yang memadai dan mampu memenuhi jadwal pengiriman.<br>- Jadwal pengadaan material disusun sejak awal pelaksanaan dan disesuaikan dengan progres pekerjaan.<br>- Tersedia alternatif penyedia material apabila terjadi kendala pasokan.<br>- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan harga pasar terkini dan mempertimbangkan potensi fluktuasi harga.<br>- Pengadaan material dilakukan sedini mungkin untuk mengurangi risiko kenaikan harga.<br>- Dilakukan survei akses lokasi sebelum pelaksanaan untuk menentukan metode distribusi material yang paling efektif.<br>- Disusun rencana logistik dan jadwal pengiriman |

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Faktor Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| | | | material yang sesuai dengan kondisi lapangan.<br>- Koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan penyedia material untuk mendukung kelancaran distribusi. |
| 2 | Rumah Susun | Pengadaan dengan system *e-purchasing* belum dapat dilaksanakan karena item dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada di market place terutama pada jenis pondasi, dimana pondasi yang diminta pada pelaksanaan Rumah Susun Kota Medan menggunakan tipe spun pile sedangkan yang tersedia tipe mini pile. | Telah dilaksanakan dokumen pengadaan apabila dilaksanakan pengadaaan dilaksanakan secara tender, PPK telah siap untuk melaksanakan. |
| 3 | Rumah Khusus | Lahan untuk relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan belum *clean and clear*, dikarenakan lahan tersebut masih milik warga belum diserahkan kepada Pemkab. | Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kelengkapan data clean and clear. |

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.**

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Upaya Yang Telah Dilaksanakan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Swadaya | - Data tidak lengkap dan kelayakan tidak sesuai<br>- Teknis pelaksanaan tidak jelas atau tidak sesuai dengan pedoman Bedah Rumah<br>- Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan Juknis Bedah Rumah | - Melakukan pengawasan lapangan dan komunikasi dengan CPB untuk melengkapi data dan dokumen<br>- Adanya Permen dan Juknis Baru<br>- Memberikan bimbingan teknis kepada tukang dan memfasilitasi konsultasi teknis lapangan | - Belum Selesai<br>- Selesai<br>- Selesai |
| 2 | Rumah Susun | Belum tersedianya alokasi anggaran | Telah berkoordinasi dengan Unor teknis dan pelaksanaan sudah menyelesaikan pelaksanaan reviu DED | Selesai |
| 3 | Rumah Khusus | Belum tersedianya alokasi anggaran dalam pelaksanaan Hunian Tetap korban bencana | Berkoordinasi dengan pusat untuk kesiapan lahan, jumlah unit yang akan dilaksanakan dan perioritas | Selesai. |

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Upaya Yang Telah Dilaksanakan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | | | utama daerah yang akan dilaksanakan dan saat ini sudah melaksanakan persiapan dokumen Lelang Konsultan Pengawasan Konstruksi | |

### 3.2. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Upaya Yang Telah Dilaksanakan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Swadaya | - Data tidak lengkap dan kelayakan tidak sesuai<br>- Teknis pelaksanaan tidak jelas atau tidak sesuai dengan pedoman Bedah Rumah<br>- Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan Juknis Bedah Rumah | - Melakukan pengawasan lapangan dan komunikasi dengan CPB untuk melengkapi data dan dokumen<br>- Adanya Permen dan Juknis Baru<br>- Memberikan bimbingan teknis kepada tukang dan memfasilitasi konsultasi teknis lapangan | - Belum Selesai<br>- Selesai<br>- Selesai |
| 2 | Rumah Susun | Belum tersedianya alokasi anggaran | Telah berkoordinasi dengan Unor teknis dan pelaksanaan sudah menyelesaikan | Selesai |

| No. | Kegiatan | Permasalahan | Upaya Yang Telah Dilaksanakan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | | | pelaksanaan reviu DED | |
| 3 | Rumah Khusus | Belum tersedianya alokasi anggaran dalam pelaksanaan Hunian Tetap korban bencana | Berkoordinasi dengan pusat untuk kesiapan lahan, jumlah unit yang akan dilaksanakan dan perioritas utama daerah yang akan dilaksanakan dan saat ini sudah melaksanakan persiapan dokumen Lelang Konsultan Pengawasan Konstruksi | Selesai. |